

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 801.733,34 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 55,05 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2019 tumbuh 5,22 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,63 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 9,95 persen. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 5,21 persen (y-on-y).

Data di BPS Di Provinsi Sumut adanya Masalah yang berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi,Dikabupaten Tapanuli Tengah jumlah tenaga kerja ditahun 2016 sebesar 165.826 pada tahun 2017 turun sebesar 157.043 dan persentase penurunan sebesar 1,05%. Namun tidak selalu diikuti dengan kenaikan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 603.221.000 dan pada tahun 2017 sebesar 634.844.000 dan persentase 0,95%. Dikabupaten Karo Belanja Modal tahun 2017 sebesar 335.935.241 dan tahun 2018 turun sebesar 222.116.791 dengan persentase 1.51%. Namun tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 1.314.585.000 dan ditahun 2018 naik sebesar 1.374.417.000 dengan persentase 0,95%. PAD di Kabupaten Simalungun pada tahun 2018 sebesar 661.815.202.074 dan turun ditahun 2019 sebesar 193.509.084.000 dengan persentase 3,43%. Namun tidak selalu diikuti dengan Pertumbuhan Ekonomi ditahun 2018 sebesar 2.599.621.000 dan ditahun 2019 sebesar 2.734.870.000 dengan persentase 0,95%.

Maka dengan melakukan penelitian terdapat perbedaan di beberapa penelitian tersebut dimana pengaruh Tenaga Kerja, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. Sehingga ini dapat kembali diuji serta dianalisis bagaimana pengaruh Tenaga Kerja ( $X_1$ ), PAD ( $X_2$ ), Belanja Modal ( $X_3$ ), dan Pajak Daerah (Z) sebagai Variabel Intervening terhadap tingkat Pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten /Kota di Sumatera Utara periode 2016 - 2019.

## **Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dilakukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja pada pertumbuhan ekonomi ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi?
3. Bagaimana dampak Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja pada Pajak Daerah?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah?
6. Bagaimana dampak Belanja Modal pada Pajak Daerah?
7. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja pada Pajak Daerah dan pertumbuhan ekonomi ?
8. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi?
9. Bagaimana pengaruh Belanja Modal pada Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi?
10. Bagaimana dampak Tenaga Kerja,Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dengan Pajak Daerah sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

## **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Menurut Halim, A. (2020), Pertumbuhan ekonomi suatu negara didefinisikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Menurut Nuraini, I. (2017) Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang dicerminkan dari naiknya tingkat inflasi.

$$\text{Ggnp} = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\%$$

### **Tenaga Kerja (X1)**

Menurut Sulistiana (2013) semakin tinggi modal akan dapat meningkatkan asil produksi, hal ini karena dalam proses produksi membutuhkan biaya yang digunakan untuk tenaga kerja dan pembelian bahan baku serta peralatan. (Mulyadi,2014:71) Seluruh penduduk yang memproduksi barang dan jasa tidak terlepas dari produktivitas dan didukung oleh tingkat investasi serta SDM yang memadai,Semakin banyak tenaga kerja maka produktivitas semakin tinggi.

**Tenaga Kerja= Jumlah Tenaga Kerja yang digunakan**

### **Pendapatan Asli Daerah (X2)**

Penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo,2018). Menurut Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019), Jika tingkat PAD suatu

daerah meningkat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut meningkat .

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

### **Belanja Modal (X3)**

(Siregar,2014:167),anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Erlinadan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan} + \text{Mesin Belanja Gedung dan bangunan} + \text{Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset tetap lainnya}$$

### **Pajak Daerah (Z)**

Menurut Resmi (2019) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara utuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusna digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.Pajak adalah biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya, Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak disebut dengan pajak daerah (Novitasari, M., & Novitasari, L. ,2019).

$$\text{Pajak Daerah} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

### **Kerangka Konseptual**

